



# Rumdin Mantan Pejabat Dibidik

## Sekwan Layangkan Surat

**Abdul Khoir**  
Borneo Tribune, Pontianak

Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar, Bambang Soerachmat telah melayangkan surat pertama kepada pihak yang menguasai atas rumah dinas pimpinan DPRD Kalbar.

Hal tersebut sebagai salah satu komitmen bersama untuk menertibkan aset milik Pemprov Kalbar yang beberapa waktu lalu sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Untuk rumah dinas unsur pimpinan di Jalan Karvin, sudah dilayangkan surat pertama," tegas Bambang, belum lama ini.

Bambang mengatakan, bahwa isi surat pertama tersebut disampaikan agar pemilik atau pihak yang tengah menguasai rumah milik Pemprov tersebut untuk segera mengosongkannya.

Sebelum pengelolaan dan tanggung jawab rumah dinas ini ditangani oleh Sekretaris Dewan (Sekwan), pengelolaan dan tanggung jawab tersebut berada di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalbar.

Ditegaskan Bambang, dari ketiga rumah unsur pimpinan tersebut hingga saat ini belum ada satupun yang telah mengantongi surat keterangan pengalihan dari Pemprov ke pihak pengguna.



Bambang Soerachmat.  
FOTO: Andry/Borneo Tribune

Namun dulu sempat pernah disampaikan surat permohonan yang disampaikan oleh Gusti Syamsumin untuk pengalihan.

"Gusti Syamsumin dulu pernah ada mengusulkan namun belum ada jawaban dari gubernur," kata Bambang.

Dari ketiga unsur pimpinan tersebut, Bambang menyebutkan surat pertama sudah seluruhnya disampaikan kepada pihak penanggungjawab, termasuk rumah yang dulu ditempati almarhum Rudi Alam Syahrudin yang diterima istrinya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Provinsi Kalbar, TFA Nyarong menegaskan, pihaknya selalu siap jika dikemudian hari mendapat tembusan untuk

melakukan penyitaan atau perintah untuk mengosongkan rumah milik Pemprov tersebut.

"Aset milik Pemprov juga menjadi tanggung jawab Pol PP dalam penertibannya," kata Nyarong.

Selain rumah dinas unsur pimpinan dewan, beberapa waktu lalu, Satpol PP Provinsi Kalbar juga telah berhasil mengembalikan rumah kepala-kepala dinas di lingkungan Pemprov Kalbar. Diantaranya rumah dinas Kesehatan, PU, Kehutanan dan Perhubungan.

"Untuk rumah dinas Nakertrans, kita juga sedang menginventarisir. Sampai saat ini statusnya sudah sampai dimana, jika belum ada surat keterangan dari gubernur untuk di DUM, maka kita akan upayakan penarikan," tandasnya. □